

Akuntabilitas Kinerja merupakan perwujudan kewajiban Dinas Kelautan dan Perikanan sebagai pemegang amanah penyelenggara pemerintahan di Bidang Kelautan dan Perikanan untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan oleh masyarakat dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban berupa Laporan Akuntabilitas Kinerja. Dinas Kelautan dan Perikanan sebagai pemegang amanah dari masyarakat Kota Padang mempunyai kewajiban untuk melaksanakan akuntabilitas dan menyajikannya di dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Padang. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja ini berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014.

Laporan Akuntabilitas Kinerja yang disusun memberikan gambaran tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan penilaian atas pencapaian target sasaran tersebut akan dapat diketahui keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan kota Padang, sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Padang.

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran, maka diberikan nilai (skor) sebagai berikut:

85 s.d 100 = Baik Sekali

70 s.d < 85 = Baik

55 s.d < 70 = Cukup

< 55 = Kurang

Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Padang dianggap berhasil mencapai kinerja sasaran apabila indikator kinerja keberhasilannya dapat diwujudkan lebih dari 70%.

3.1 METODOLOGI PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2018

Pengukuran pencapaian kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Padang tahun 2018 dilakukan dengan analisis deskriptif dengan metode perbandingan capaian kinerja sasaran. Metode perbandingan capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan antara rencana kinerja (performance plan) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (performance result) yang dicapai Dinas dan melakukan perbandingan juga dengan capaian pada tahun sebelumnya. Selanjutnya akan dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (performance gap) yang terjadi dan tindakan perbaikan yang perlu dilakukan di masa mendatang. Metode ini bermanfaat untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak eksternal tentang sejauh mana pelaksanaan misi Dinas Kelautan dan Perikanan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pengukuran capaian kinerja tahun 2018 merupakan tahun ketiga pelaksanaan RPJMD tahun 2014 - 2019.

3.2 INDIKATOR KINERJA

Indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja digunakan untuk melihat tingkat kinerja baik dalam tahapan perencanaan, pelaksanaan, maupun tahapan setelah kegiatan selesai dan berfungsi. Capaian indikator kinerja sasaran pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Padang tahun 2018 diukur dari tercapainya kondisi yang ingin diwujudkan pada tingkat outcome.

3.3 PENGUKURAN KINERJA SASARAN

Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Padang telah menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana strategis. Pada Tahun 2018 Dinas Kelautan telah menetapkan delapan sasaran strategis dan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Padang dapat melaksanakan ke 8 (delapan) strategis yang telah ditetapkan.



Sasaran 1
Meningkatnya Industri Hasil Kelautan Perikanan

Untuk mewujudkan sasaran kedua di atas, Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Padang telah menetapkan target kinerja tahun 2018 yang capaiannya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.1
Capaian Kinerja Sasaran Pertama

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian Tahun 2018	% Capaian Tahun 2017
1.	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan (Tangkap, Budidaya dan Olahan Perikanan)	1,1%	1.00%	90,91	96.00
2.	Persentase Peningkatan Industri Hulu Sektor Kelautan Perikanan	15,20%	15,20%	100	93.00
3.	Persentase Peningkatan Industri Hilir Sektor Kelautan Perikanan	7.35%	8,40%	114.29	100

Persentase Produksi Perikanan baik dari sub sektor perikanan tangkap, perikanan budidaya dan olahan perikanan mengalami pasang surut pada tahun 2018. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi, *pertama*; berlakunya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71 Tahun 2016 tentang JALUR PENANGKAPAN IKAN DAN PENEMPATAN ALAT PENANGKAPAN IKAN DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap beroperasinya

kapal penangkap ikan jenis bagan di Propinsi Sumatera Barat. Sementara bagan adalah penyumbang terbesar hasil tangkapan ikan di Sumatera Barat khususnya di Kota Padang demikian pula. Di samping itu selama tahun 2018 terjadi anomali cuaca yang cukup ekstrim yang mengakibatkan nelayan tidak berani melaut terlalu jauh menuju daerah tangkapan (fishing ground) yang lebih banyak ikannya. *Kedua;* bidang budidaya terjadi penurunan produksi dikarenakan oleh adanya normalisasi Sungai Gunuang Nago sebagai akibat banjir bandang yang terjadi tahun 2016. Dampak yang dirasakan oleh pembudidaya ikan yang terpapar banjir bandang adalah rusaknya irigasi

menuju kolam masyarakat. *Ketiga;* Menurunnya produksi ikan segar juga berdampak pada persediaan ikan kering dan olahan. Dampak global yang dirasakan konsumen atau masyarakat adalah tingginya harga ikan dan melemahnya daya beli masyarakat. Masyarakat mencoba beralih ke produk hewani lainnya seperti daging sapi dan ayam.

Indikator ke dua yaitu Persentase Peningkatan Industri Hulu mencapai 100% karena target yang direncanakan sebelumnya adalah berdirinya industri pakan mandiri bagi pembudidaya ikan sebanyak 1 unit. Melalui program Pakan Mandiri dari kementerian kelautan dan perikanan menumbuhkan 1 unit pabrikan pakan dengan skala kelompok bukanlah hal yang sulit. Tingginya harga pakan untuk budidaya ikan mengakibatkan pembudidaya ikan mencoba program Pakan Mandiri.

Indikator ketiga yaitu Persentase Peningkatan Industri Hilir mengalami peningkatan 14,29%. Hal ini disebabkan banyaknya tumbuh industri olahan perikanan yang muncul dengan skala rumah tangga. Warung-warung makan dengan menu ikan dan olahan ikan semakin banyak, di samping itu diversifikasi produk – produk olahan perikanan semakin beragam, tidak sekedar nugget dan bakso saja, tetapi sudah mulai mencoba menu-menu baru seperti brownis ikan, sate ikan tuna, dan masih banyak yang lainnya.



Sasaran 2

Meningkatnya Kesejahteraan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan


Untuk mewujudkan sasaran kedua di atas, Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Padang telah menetapkan target kinerja tahun 2018 yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Sasaran Kedua

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian Tahun 2018	% Capaian Tahun 2017
1.	Persentase Peningkatan Pendapatan Nelayan	1.35%	1.27%	94,07	139
2.	Persentase Peningkatan Pendapatan Pembudidaya Ikan	1.64%	1.76%	107,32	100
3	Persentase Peningkatan Pendapatan Pengolah Pemasar Hasil Perikanan	3.0%	3.102%	103,40	79

Yang dimaksud Peningkatan Pendapatan Nelayan adalah jumlah daya beli nelayan berbanding dengan jumlah pendapatan nelayan pada tahun berjalan. Semakin tinggi persentase pendapatan nelayan akan berbanding lurus dengan daya beli nelayan. Indkes daya beli nelayan digambarkan dalam Nilai Tukar Nelayan (NTN) pada tahun anggaran berjalan. Tahun 2018 terjadi peningkatan pendapatan nelayan yang mengakibatkan daya beli nelayan juga meningkat. Indeks NTN untuk Propinsi Sumatera Barat pada tahun 2016 menunjukkan sebesar 100,3531 tahun 2017 Indeks NTN yang dikeluarkan BPS Pusat sebesar 101, dan untuk indeks tahun 2018 sebesar 108,00. Data indeks NTN juga didukung dengan meningkatnya pendapatan per kapita per tahun nelayan di Kota Padang semula ditargetkan meningkat sebesar Rp 5.590.000/bulan menjadi Rp. 7.750.000/bulan (data indeks diambil dari rata-rata pendapatan nelayan penuh Kota Padang selama tahun 2018). Walaupun indeks NTN naik,

kenyataannya pendapatan nelayan cenderung menurun karena tingkat produksi ikan segar menurun. Sedangkan Pendapatan Pembudidaya Ikan adalah jumlah pendapatan nelayan berbanding seajar dengan daya beli pembudidaya ikan dalam tahun berjalan. Dari data yang diterima dari Penyuluh Perikanan Lapangan bahwa pendapatan pembudidaya ikan telah mencapai target yang ditetapkan. Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Padang tidak dapat menetapkan target yang terlalu tinggi mengingat pembudidaya ikan masih mengalami kerugian dari banjir bandang di Gunung Nago. Berdasarkan target yang telah ditetapkan dalam RPJMD maupun renstra SKPD, maka capaian target sudah sesuai dengan yang telah ditetapkan tersebut. hal ini karena adanya konsekuensi dan tanggung jawab untuk pencapaian kinerja bidang-bidang yang bertanggungjawab selalu melakukan pembinaan, motivasi, monitoring dan evaluasi terhadap kinerja yang telah ditetapkan.

	<p>Sasaran 3 Meningkatnya Pola Konsumsi Ikan</p>
--	--

Untuk mewujudkan sasaran ketiga di atas, Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Padang telah menargetkan indikator kinerja tahun 2018 yang dapat dilihat pada tabel dibawah:

Tabel 3.3
Capaian Kinerja Sasaran Ketiga

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian Tahun 2018	% Capaian Tahun 2017
.					

1.	Persentase Peningkatan Konsumsi Ikan Per Tahun	0.85	0.92	108.24	103
----	--	------	------	--------	-----


Penjelasan indikator kinerja pada tabel 3.3 diuraikan sebagai berikut:

Persentase Peningkatan Konsumsi Ikan Per Tahun

Yang dimaksud Peningkatan Konsumsi Ikan Per Tahun adalah jumlah ikan yang dikonsumsi masyarakat per kepala keluarga dibagi dengan jumlah penduduk kota Padang. Tingkat konsumsi ikan dihitung berdasarkan jumlah ikan yang dikonsumsi keluarga baik ikan segar, ikan kering dan olahan ikan. Menjamurnya Rumah Makan yang menyajikan menu masakan serba ikan seperti Rumah Makan Ikan Karang, Rumah Makan Lauak Pukek dan Rumah Makan Ikan Asin Panas cukup mendorong tingkat konsumsi ikan di Kota Padang. Dari data tabel 3.3 di atas jika dibandingkan dari tahun 2017 tidak terjadi kenaikan berarti, hal itu disebabkan oleh target yang ditetapkan juga proporsional per tahunnya. Angka konsumsi 33,60 kg/kapita/tahun merupakan angka yang cukup menggembirakan karena untuk tingkat Nasional tingkat konsumsi per kapita per tahun adalah sebesar 36,39 kg/kapita/tahun (*sumber : pusat data dan informasi Kementerian Kelautan dan Perikanan RI*).

Tiga sasaran strategis di atas merupakan sasaran yang masuk ke dalam Indikator Kinerja Utama Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Padang. Di samping itu ada Sasaran pendukung (intermediate goals) yang cukup dibebankan kepada Sekretaris dan dibantu oleh 2 Kasubag yaitu Kasubag Umum dan Kasubag Keuangan.

Sasaran yang keempat adalah sebagai berikut:

	<p>Sasaran 4 Meningkatnya Tata Kelola / Manajemen Kinerja</p>
---	---

Untuk mewujudkan sasaran keempat di atas, Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Padang telah menetapkan target indikator kinerja tahun 2018 yang dapat dilihat pada tabel dibawah:

Tabel 3.4
Capaian Kinerja Sasaran Keempat

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian Tahun 2018	% Capaian Tahun 2017
1.	Meningkatnya Kelembagaan DKP	B	BB	100	100
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja DKP	78	70.39	91	90

Penjelasan indikator kinerja pada tabel 3.4 dengan sasaran Meningkatkan volume perdagangan produk kelautan dan perikanan diuraikan sebagai berikut :

Meningkatnya Kelembagaan Dinas Kelautan dan Perikanan

Pengukuran Sasaran keempat terdiri dari 2 indikator Kinerja seperti tabel 3.4 di atas dapat diukur dari 3 faktor yaitu : 1). Tingkat Kepuasan Pelayanan Publik, 2). Tingkat Kedisiplinan Aparatur Sipil Negara dan 3). Tingkat Kualitas SDM Aparatur. Tingkat Kepuasan Pelayanan Publik diukur melalui kepuasan masyarakat dalam pengurusan dokumen perkapalan di Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Padang yang dimulai dari Front Office hingga operator rata-rata masyarakat merasa puas dengan keramahmatan petugas. Tingkat Kedisiplinan ASN dapat diukur dari kehadiran dan kinerja ASN selama Tahun 2018 yang menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan yaitu mencapai 95% dari total seluruh ASN. Sedangkan 5% lagi terdiri dari ASN yang datang terlambat namun dikompensasi dengan pulang lambat pula. Ini menunjukkan kinerja ASN lebih mendahulukan tugas dan fungsi demi mencapai kinerja yang lebih baik sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang berlaku.

3.4. PENGUKURAN KINERJA KEUANGAN

3.4.1 Target dan Realisasi Belanja Daerah

Dalam rangka pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2018, dari APBD Kota Padang Tahun 2018 untuk Dinas Kelautan dan Perikanan didukung anggaran sebesar Rp. 13.905.551.030,86 yang dibagi dalam Belanja Tidak Langsung yakni sebesar Rp. 4.476.654.800,86 dan Belanja Langsung sebesar Rp. 9.428.896.230,-

Pada Belanja Tidak Langsung realisasi fisik sebesar 98.04 % dan realisasi keuangan sebesar Rp.4.090.837.971 (91,38%). Sedangkan dalam Belanja Langsung dibagi dalam 12 program dan 43 kegiatan dengan realisasi fisik sebesar 99,73% dan realisasi keuangan sebesar 98,26 % atau Rp. 9.264.967.088,-

Selain Belanja Daerah, Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Padang memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam bentuk hasil retribusi daerah dan lain-lain pendapatan yang sah. Target PAD sebesar Rp.3.120.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.723.290.500 atau sebesar 55.23%.

Pendapatan

No	Uraian	Target	Realisasi	%
1	Retribusi penjualan produksi usaha daerah Penjualan benih ikan	2.969.700.000	1.650.448.500	55,58
2	Retribusi Pemakaian kekayaan daerah Sewa kendaraan thermoking	49.500.000	56.950.000	115,05
	Lain-lain pendapatan yang dikelola dinas Sewa Cold Storage Sewa Tempat Pengolahan Ikan	100.800.000	22.479.000	15,77
	Jumlah	3.120.000.000	1.723.290.500	55,23

Belanja Tidak Langsung

No	Kegiatan	Realisasi		Keterangan
		Fisik (%)	Keu .(%)	
1	2	3	4	5
1	Gaji dan Tunjangan Rp. 2.971.884.800,86	99.00	96.20	Terealisasi Rp. 2.858.833.971,00
	Tambahan	100	90.58	Terealisasi

	penghasilan berdasarkan beban kerja Rp.1.360.100.000,-			Rp.1.232.004.000,-
	Insentif pemungutan retribusi daerah Rp.144.670.000,-	60	0	Terealisasi Rp.0,- (tidak tercapai target)

**3.5. PENGUKURAN KINERJA BERDASARKAN CAPAIAN
INDIKATOR KINERJA UTAMA DENGAN BAB VII RPJMD**

No	Indikator Kinerja	Realisasi				Target
		Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	RPJMD/Renstra Tahun sekarang
Meningkatnya Industri Hasil Kelautan Perikanan						
1	Rata-rata pendapatan pelaku usaha perikanan	0 %	1.64 %	1.64%	1.64%	1.64 %
2	Kontribusi sektor perikanan PDRB	0	4.41	4.40%	4.42%	4.42
3	Jumlah eksportir usaha kelautan dan perikanan	0 Orang	1 Orang	1 orang	1 orang	1 Orang
4	nilai perdagangan ekspor dari sektor budidaya perikanan	0 Milyar	0.4 Milyar	0.416 Milyar	0.343 milyar	0.45 Milyar
5	nilai perdagangan ekspor dari sektor perikanan tangkap	0 Milyar	34.03 Milyar	80, 61 Milyar	101 Milyar	53.1 Milyar
6	Jumlah industri hulu usaha kelautan dan perikanan	0 Unit	4 Unit	1 unit	1 unit	4 Unit
7	Jumlah industri hilir usaha kelautan dan perikanan	0 UMKM	131 UMKM	131 UMKM	131 UMKM	131 UMKM
Meningkatnya Kesejahteraan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan						
8	Jumlah penyerapan tenaga kerja usaha kelautan dan perikanan	0 Orang	99 Orang	80 orang	50 orang	80 Orang
9	Jumlah penurunan KK miskin di kawasan pesisir	0 Orang	80 Orang	80 orang	80 orang	80 Orang
Tercapainya tingkat konsumsi ikan perkapita /tahun						
9	capaian produksi ikan	0 Ton	24218.45 Ton	20.897 ton	21.722 tin	25113.13 Ton
10	Nilai perdagangan dalam dan antar daerah	0 Milyar	474.2 Milyar	416.96 milyar	343,45 milyar	479.35 Milyar
11	Tercapainya tingkat konsumsi ikan per kapita/tahun	0 Kg/Kapita/Tahun	33.2 Kg/Kapita/Tahun	33.40 kg/kapita/tahun	33.60 kg/kapita/tahun	33.4 Kg/Kapita/Tahun
Zero complaint untuk pelayanan kepada masyarakat						
12	Persentase kepuasan masyarakat pelaku usaha kelautan dan perikanan yang mengurus perizinannya	0 %	80 %	85%	91%	80 %

